



Bagian Satu: Alasan Riau untuk Merdeka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Mengapa Harus Merdeka?

Aksi bisu yang dipentaskan oleh para utusan daerah (UD) Riau dalam Sidang Umum MPR lalu, sungguh menyakitkan hati masyarakat. Ulah mereka itu, seakan makin membusukkan jati diri rakyat Riau setelah selama ini selalu dikesampingkan oleh arogansi kekuasaan pemerintah pusat. Sungguh tidak bisa diterima oleh akal sehat, betapa bekunya hati para wakil rakyat Riau tersebut, yang tidak tergerak hatinya sedikitpun untuk memperjuangkan aspirasi rakyatnya.

Kelupaan mereka pada darah mahasiswa yang tertumpah untuk memperjuangkan bagi hasil minyak adalah sebuah pengkhianatan yang tak terukur naifnya terhadap pergerakan reformasi di Riau. “Kepekakkan” mereka terhadap tangis, air mata dan darah rakyat Tambusai adalah sebuah bentuk pengingkaran amanat rakyat yang tak ternilai munafiknya terhadap upaya pemberdayaan rakyat Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Belum lagi bila diukur dari erangan para bayi busung lapar yang kini masih terbujur di seantero jagad Riau.

Bila wakil rakyat yang diharapkan dapat mengemban amanat penderitaan, dan mereka tidak dapat diandalkan, maka kemunculan untuk membentuk negara sendiri dan memproklamkan kemerdekaannya dari NKRI, saya pikir wajar saja terkuak kepermukaan. Pilihan paling rendah adalah dijadikannya Indonesia sebagai negara federal atau otonomi yang seluas-luasnya diberlakukan untuk Riau. Alasan untuk merdeka, tentunya tidak hanya didasari oleh *mbalelon* wakil rakyat itu.

Lebih lugas lagi, apakah selama ini NKRI memang telah melakukan penjajahan terhadap rakyat Riau, sehingga ada alasan yang konkrit untuk memproklamkan kemerdekaan? Jawaban seperti itu tentunya dapat dilihat dari dua aspek pendekatan, yakni pendekatan sumberdaya alam (SDA) dan pendekatan sumberdaya manusia (SDM). Pendekatan ini, diambil mengingat kedaulatan sebuah negara adalah bentuk dari kekuasaan dan kedaulatan rakyat yang ada di dalam negara untuk menggunakan atau memanfaatkan segala sumber alam ciptaan Tuhan untuk kesejahteraannya.

Dari aspek SDA, ternyata anugerah Tuhan Yang Maha Esa itu, telah dikangkangi oleh arogansi pemerintah pusat dan dampaknya terhadap masyarakat Riau hanyalah berbentuk penderitaan. Minyak Bumi yang melimpah ruah, hanya berguna bagi kemakmuran orang yang bekerja di situ dan penguasa pemerintah dengan para kroninya. Tetesan kenikmatan rezeki minyak pada masyarakat Riau tidak dapat dijadikan pelepas dahaga dalam padang pasir kemiskinan.

Gas Alam yang dieksploitasi dari daerah Natuna, hanya



menjadi tontotan masyarakat yang sedang dihimpit beban kemelaratan. Penambangan Timah di Singkep, telah meninggalkan lubang-lubang penderitaan. Pengerukan Pasir Laut di Tanjung Balai Karimun, hanya menambah lubuk-lubuk kepedihan. Luka hati rakyat Riau semakin menganga dan berdarah dari proses ganti rugi tanah yang terjadi di Pulau Bintan. Termasuk pula pengkaplingan Pulau Bareng dalam bentuk daerah Otorita, yang hanya menunjukkan penginjak-injakan” kedaulatan rakyat Riau.

Bila diarahkan pandangan ke sektor kehutanan, maka cerita duka rakyat semakin panjang dan berliku babakannya. Penambangan membabi buta kayu hutan, hanya melahirkan penderitaan. Pabrik-pabrik yang mengolah hasil hutan, tak sedikitpun mempedulikan akibat yang ditimbulkan perbuatan mereka bagi rakyat. Sudahlah hasil hutan itu tak bisa dijadikan sumber pendapatan masyarakat, pengolahannya pun mendatangkan kesengsaraan. Air yang tercemar, jalan-jalan yang hancur, dan bau busuk limbah adalah setumpuk akibat yang harus ditanggung masyarakat.

Pembangunan sub-sektor perkebunan yang didominasi oleh sawit, juga mengedepankan penderitaan masyarakat ketimbang manfaat yang dapat dinikmatinya. Tangis dan darah rakyat Tambusai adalah wujud kesewenang-wenangan pada masyarakat yang lahir dari sistem NKRI selama ini. Bencana asap dari pembakaran hutan untuk perkebunan telah menyesakkan dada rakyat tanpa dapat dinikmati hasilnya.

Dilihat dari aspek SDM, ternyata pola pembangunan yang diuja pemerintah NKRI selama ini, hanya melahirkan ketertinggalan masyarakat Riau. Rakyat Riau menjadi kalah



bersaing, karena program pembangunan pendidikan dan pengembangan SDM hanyalah secuil saja dari apa yang sesungguhnya harus dilakukan. Dibanding dengan pengembangan pendidikan di Pulau Jawa, sangatlah tidak sepadan. Sebagian besar rakyat Riau yang tinggal di wilayah pedesaan hanya mengecap pendidikan SD ke bawah.

Ironisnya, ketertinggalan dalam pembangunan bidang pendidikan ini dijadikan kambing hitam untuk tidak menerima rakyat Riau bekerja di sektor industri yang dikembangkan di daerahnya sendiri. Bukannya dilakukan proses pembelajaran melalui perusahaan-perusahaan tersebut, agar terjadi alih teknologi dan peningkatan mutu SDM Riau.

Selain itu, pemerintah pusat telah sukses pula mengimpor kebodohan dan masyarakat marginal dengan program transmigrasinya. Sejak pra-Pelita hingga saat ini, sudah ada 500.000 lebih transmigran yang didatangkan ke provinsi Riau, dengan kualitas pendidikan yang amat rendah. Ditambah dengan buruh-buruh pabrik dan pekerja perkebunan yang datang secara spontan. Kemudian juga, telah datang pula para penjaja seks yang amat merugikan pengejawantahan budaya Melayu Riau.

Pada tatanan pimpinan birokrasi, selama ini pemerintah NKRI menunjukkan arogansi yang tidak produktif bagi pengembangan masyarakat Riau. Lihatlah kasus Imam Munandar atau perilaku Soeripto, dan banyak lagi bupati impor yang kinerja dalam mengangkat harkat dan martabat rakyat sangatlah minim, kalau dibilang tidak ada. Termasuk para pejabat di jajaran sektoral yang seolah-olah hanya menjadikan provinsi ini sebagai ajang perburuan dan tempat mengumpulkan kekayaan pribadi.



Berbagai “bekingan”, juga dilakukan oleh beberapa oknum pejabat NKRI terhadap para pemburu rente yang beroperasi di Riau. Melalui metode kooptasi, maka bersilweranlah para jenderal, anak pejabat, dan bahkan keluarga lingkungan Cendana (Soeharto) yang menjadi komisaris dan direktur perusahaan yang dimodali oleh para cukong agar mampu mengeksploitasi Riau sekehendak hati mereka tanpa mempedulikan akibatnya dikemudian hari.

Saat ini, masyarakat Riau, setelah lebih dari setengah abad lamanya NKRI merdeka, hanya hidup dengan segala fasilitas yang sangat terbatas. Infrastruktur transportasi, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas publik lainnya, sangat tidak memadai untuk menunjang pemberdayaan rakyat. Sarana yang dimiliki juga tidak dapat diandalkan untuk menjalankan proses menuju masa depan yang lebih baik. Diperlukan kerja keras dan dana yang cukup besar untuk menyulap semua itu.

Untuk membangun Riau pada tataran yang lebih baik, pada mulanya telah digantungkan harapan pada pemerintah NKRI yang baru dibentuk. Melalui wakil-wakil rakyat Riau, selanjutnya dititipkan semua masalah itu untuk diseruakkan pada Sidang Umum MPR. Terbayang dalam benak rakyat Riau, para wakil mereka tersebut akan “bernyanyi” dan memekikan hati nurani mereka. Namun apa daya, harapan hanya tinggal impian.

Ke depan, pembangunan masyarakat Riau, tentunya tidak dapat lagi mengandalkan sistem yang dipakai NKRI sekarang. Sebab, masih belum jelas juntrungannya, Riau akan dikembangkan dengan pola apa dan caranya apakah benar-benar sesuai dengan aspirasi rakyat. Bila dikaitkan



dengan hutang luar negeri Indonesia, yang telah membengkak menjadi US\$ 150 milyar, maka kelanjutan otonomi daerah “masih jauh panggang dari api”. Pilihan terbaik kelihatannya hanya ada dua opsi; hidup dalam NKRI dengan sistem federal atau melepaskan diri dari NKRI, alias “Merdeka!”***

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Efoha Gus Dur dan Riau Merdeka

Tidak gampang memang untuk memahami Gus Dur. Sejak di PB-NU, berbagai hal yang sulit dipahami orang pernah dilakukannya. Namun, dalam peringkat orang paling berkuasa di Asia, nama Gus Dur jarang tertinggal. Ia sempat menjadi tokoh yang memiliki massa yang cukup besar, sehingga hanya Gus Dur yang dapat disetarakan dengan Soeharto waktu itu. Pada saat reformasi bergulir, dan orang berupaya melengserkan kekuasaan Soeharto, Gus Dur justru dengan entengnya melakukan sarapan pagi bersama dengan penguasa tunggal Orba itu.

Melalui pengaruhnya, Gus Dur juga melakukan pemusatan kekuatan politik ke arah dirinya dengan mengadakan pertemuan Ciganjur pada saat ketidakpercayaan orang pada Habibie selaku presiden penerus era Soeharto makin memuncak. Safari politik Gus Dur berjalan dengan skenarionya sendiri. Terkadang, tak jarang orang mengacungkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

jempol terhadap tindak tanduknya tersebut, namun tak sedikit juga orang menilainya sebagai hal yang tidak sangat masuk akal.

Terpilih menjadi presiden, setelah Amien Rais memunculkan namanya sebagai kandidat, merupakan kisah monumental tersendiri bagi perjalanan politik Gus Dur. Kekalahan Megawati, meskipun dicalonkan oleh PDI-P sebagai partai pemenang Pemilu, menunjukkan garis baru kehidupan politik Gus Dur. Poros Tengah yang amat solid ketika itu, berpikir betapa sulitnya mencari figur presiden yang dianggap mampu melakukan konsolidasi untuk mempersatukan kekuatan bangsa yang telah tercabik-cabik ini. Gus Dur dianggap sebagai orang yang mampu meredam gejolak, khususnya menghadapi massa banteng Megawati yang sudah siap menghadapi apa saja, kalau Mega tidak terpilih jadi presiden.

Gaya Gus Dur yang khas, ternyata mampu menahan gejolak yang lebih parah. Orang lain, akan sulit melakonkannya secara baik. Gus Dur memang tidak dapat mengesampingkan jasa Amien Rais. Hanya saja, kepercayaan dirinya memang sulit untuk ditandingi, sehingga pencalonan yang semula dianggap gurauan oleh berbagai pihak, menjadi sebuah kenyataan yang harus diterima oleh semua pihak. Lantas, dengan jabatannya sebagai orang nomor satu di republik ini, ternyata Gus Dur tidak banyak berubah.

Safari politiknya, tetap berjalan dengan gaya “sarapan pagi”nya. Hal-hal yang di luar dugaan orang, tetap dilakukannya dengan enteng. Perjalanan keliling dunia Gus Dur, dinilai sebagai sebuah safari yang sukses untuk menumbuhkan kepercayaan asing pada Indonesia. Para pengikut



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Gus Dur sendiri, sampai kewalahan menghadapinya. Sebab, secara fisik aktivitasnya tersebut sangat mencengangkan dapat dilakukan oleh seorang Gus Dur. Cerita dukungan dari “10 juta jin” pun berkembang. Keputusan-keputusan Gus Dur, sepertinya banyak didukung oleh kemampuan supranatural yang dimilikinya.

Soal keberanian, Gus Dur memang belum dapat disaingi lawan-lawan politiknya. ABRI yang selama ini sangat berkuasa, dapat “dijinakkan”nya. Ketegasannya melengserkan Wiranto yang memiliki poros kuat di ABRI, merupakan prestasi tersendiri. Bahkan pemilihan Widodo sebagai Pangab dari Angkatan Laut (AL), merupakan tradisi baru yang dilakukan Gus Dur. Termasuk juga mensipilkan Menhankam. Isu-isu tentang berbagai hal menyangkut ABRI, juga banyak dilontarkan Gus Dur. Akhirnya, malah bermuara pada menguatnya kekuatan politik Gus Dur sebagai presiden. Popularitas Gus Dur makin terangkat, ketika berbagai gerakan yang dianggapnya merongrong kekuasaan presiden dapat diantisipasi secara dini. Orang bahkan, sekali lagi mengkaitkannya dengan kekuatan supranaturalnya.

Makin lama, kelihatannya Gus Dur makin terbuai dengan keputusan-keputusannya sendiri. Mungkinkah Gus Dur terjangkit eforia atas keberhasilannya sebelum ini? Sebab, ketika rakyat menginginkan perbaikan kesejahteraan, Gus Dur justru hanya mampu memberikan lakon-lakon politik yang kurang signifikan dengan itu.

Niat Gus Dur mencabut TAP No. XXV/MPRS/1966 memunculkan pro dan kontra, yang justru tidak mendukung pemulihan ekonomi. Kerusuhan demi kerusuhan di berbagai



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

daerah tidak kunjung reda. Masyarakat justru, tidak memiliki pedoman yang jelas untuk memposisikan dirinya sebagai anak bangsa.

Pada bagian lain, muncul tuduhan bahwa justru kabinet Gus Dur-lah yang harus bertanggung jawab. Persoalan berikutnya, mendatangkan “korban”. Laksamana Sukardi dan Yusuf Kalla dilengserkan. Lelucon “*Wong begitu saja kok repot*”, menghantam Golkar dan PDI-P, mengingat keduanya merupakan kader partai tersebut.

Sosok Gus Dur yang sulit dipahami dan diramal (*unpredictable*) memunculkan berbagai spekulasi tidak menentu. Dalam sebuah seminar yang bertema “Memahami Gus Dur” di Jakarta, Prof. Dr. Azyumardi Azra, pengamat politik Islam di Indonesia, mengatakan bahwa Gus Dur sebagai orang yang sulit dipahami dan cenderung pada mistisme. Pengambilan keputusan politik sering didasarkan pada wahyu, ilham, atau hal-hal yang berbau keramat. Dari sudut demokrasi, ini jelas tidak memadai. Sebab, banyak soal tidak dapat diselesaikan dengan *insting* semata, tetapi harus memakai logika rasional. Mochtar Pabotinggi, dalam kesempatan yang sama, malah menilai Gus Dur bukanlah sosok yang toleran.

Gus Dur memiliki multipikasi etis dan politis yang bisa berpindah-pindah. Arief Budiman, justru menyarankan agar jangan berharap banyak dari Gus Dur. Dalam soal demokrasi dan pluralisme misalnya, Gus Dur memang dapat dibalang *stubborn*. Tetapi, Gus Dur perlu pendamping sekaliber Bung Hatta. Beberapa pendapat tersebut, pada akhirnya memberikan sinyal bahwa ternyata Gus Dur dalam memimpin bangsa ini, berada pada kisaran yang “tidak



rasional, “kurang etis”, “tidak konsisten”, dan bahkan “kurang mampu”, sehingga membutuhkan bantuan orang berkaliber tinggi. Sementara itu, masyarakat justru menunggu berakhirnya kepedihan krisis. Dan mereka secara berangsur, ingin menikmati apa yang selama ini didambakan, yakni “Indonesia Sejahtera”.

Kebingungan masyarakat akibat inkonsistensi Gus Dur, tentunya tidak dapat diharapkan bagi penyelesaian krisis bangsa ini pada masa yang akan datang. Bagi Riau sendiri, inkonsistensi Gus Dur itu, telah menanamkan luka hati yang mendalam dalam dan pedih. Justru, masyarakat Riau sangat mengharapkan ketegasan nyata dari Gus Dur, tentang kepastian berbagai tuntutan yang sebelum ini telah disampaikan. Tanpa itu, dikhawatirkan justru Riau tetap akan tenggelam dalam keterbelakangannya atau malah hancur dalam konflik yang tidak berkesudahan.***

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Referendum, Dilema bagi Riau

Isu referendum di berbagai daerah mulai bergaung. Masyarakat Aceh tumpah ruah di jalanan. Mereka mendukung dilaksanakannya jajak pendapat untuk memberikan kesempatan pada rakyat Aceh menentukan masa depannya sendiri. Merdeka merupakan pilihan paling favorit yang mengedepan. Referendum merupakan cara damai yang ingin ditempuh rakyat Aceh untuk dapat mendirikan negara sendiri, sebagaimana yang dialami oleh Timor Timur. Suara yang sama juga disampaikan masyarakat Irian Barat dan Riau.

Tuntutan untuk melakukan referendum, pada dasarnya dipicu oleh ketidakpuasan berbagai daerah terhadap perilaku pemerintah pusat, yang selama ini sangat sentralistik dan otoriter. Daerah dalam satu kesatuan wilayah Indonesia hanya dipandang dan diperlakukan sebagai “sapi perahan” untuk kepentingan penguasa dan kroni-kroninya.



Arti kemerdekaan bagi masyarakat di daerah hanya dianggap sebagai penggantian penjajahan dari bangsa asing ke tangan penguasa bangsa sendiri.

Bagi Riau, gagasan untuk berdiri sebagai negara sendiri dan terlepas dari cengkraman pemerintah pusat, juga sudah digagas oleh beberapa komponen masyarakat. Selama ini, sejak bergabung dengan NKRI, Riau hanya menjadi ajang pemburuan kekayaan pemerintah pusat, yang hanya meninggalkan “lubang-lubang penderitaan” pada masyarakatnya. Sumberdaya alam (SDA) yang melimpah, hanya menjadi tontonan. Tetesannya yang diterima sangat tidak sebanding dengan hasil yang telah dikuras dan diambil pusat.

Sampai pada era pemerintahan Gus Dur, titik terang bagi kesempatan rakyat Riau untuk memperoleh perlakuan yang layak sebagai sesama rakyat Indonesia, masih berupa janji manis. Pernyataan Gus Dur selaku presiden untuk memberikan kompensasi 75 persen hasil SDA Riau dipandang masyarakat sebagai olok-olokan belaka. Menindaklanjuti UU No. 25 Tahun 1999 saja tidak kunjung kesampaian, apalagi merealisasikan “cerita gombal” tersebut. Dalam pemikiran yang rasional, tentunya timbul berbagai sikap pesimis, mengingat kondisi Indonesia saat ini cukup memprihatinkan.

Kemarahan masyarakat Riau menjadi memuncak ketika wakil mereka (anggota Utusan Daerah) di Sidang Umum MPR melakukan “gerakan tak berbunyi (GTB)”. Pengadilan rakyat terhadap mereka di depan DPRD akhirnya memunculkan ide untuk melakukan referendum di Riau dengan empat opsi; merdeka dari NKRI, menjadi bagian



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

NKRI dengan sistem federasi, otonomi luas, dan tetap berada pada posisi seperti saat ini. Meskipun tawaran ini disampaikan oleh orang sekaliber Sarwan Hamid (mantan Mendagri pada era pemerintahan Habibie), implikasinya haruslah dicermati dengan baik.

Keberhasilan referendum di Riau, tentunya sangat tergantung pada berbagai aspek. Bila sasarannya adalah untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada rakyat Riau untuk hidup sebagai masyarakat yang utuh dan memiliki hak yang wajar terhadap SDA-nya, maka referendum mungkin akan menghasilkan hal yang kurang menjanjikan. Ada beberapa alasan yang menyebabkan referendum Riau hasilnya akan berbeda dengan referendum di Timor Leste atau yang akan diperoleh Aceh dan Irian Barat.

Pertama, karakteristik masyarakat Riau sangat beragam sejalan dengan keragaman suku penduduknya. Dari 4,4 juta lebih penduduk yang terdaftar secara administratif, hanya 39 persen yang bisa ikut memilih yang terdistribusi dalam berbagai suku. Komitmen 117 ribu Kepala Keluarga (KK) masyarakat transmigrasi dan orang Jawa lainnya terhadap Riau yang independen, tentunya masih diragukan. Termasuk kelompok masyarakat Sumbar dan Batak, yang dominan di perkotaan, serta masyarakat Banjar dan Bugis di berbagai wilayah di kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Sehingga, sejak dulu Riau identik dengan sebutan "Indonesia mini".

Kedua, secara nyata di Riau masih terdapat berbagai primordialisme perwilayahan. Hal ini tampak dari keinginan masyarakat Kepulauan Riau, yang ingin memisahkan diri dari provinsi induknya (Riau), dan bahkan ingin merdeka menjadi negara sendiri seandainya Riau lepas dari NKRI.



Di wilayah daratan sendiri, pandangan primordial tersebut juga masih mengemuka. Kondisi ini akan kontra produktif terhadap hasil akhir referendum yang lebih mengarah kepada pemberdayaan rakyat. Dapat saja terjadi referendum lanjutan setelah referendum pertama selesai, karena masing-masing wilayah di Riau menuntut berdiri sendiri.

Ketiga, pemerintah pusat, tentunya tidak akan tinggal diam dengan kepentingan mereka dan kroninya di Riau. Hasil referendum dapat menimbulkan terganggunya keleluasaan mereka menjarah Riau. Tidak tertutup kemungkinan akan timbul rekayasa-rekayasa politik untuk mempertahankannya. Rakyat Riau akan tercabik-cabik seperti halnya yang terjadi di Ambon. Saat ini saja, tanda-tanda ke arah itu sudah mulai terlihat.

Jalan keluar untuk memberdayakan dan mensejahterakan rakyat Riau melalui referendum dari aspek di atas, tentunya perlu dipertimbangkan. Sebuah model pembangunan Riau yang mengakomodir semua elemen masyarakat dan memiliki keterkaitan dengan komunitas lain di sekitar provinsi ini, juga perlu lebih dirumuskan.

Tanpa harus menggagas referendum model perlakuan terhadap Riau, yang lebih produktif adalah menjadi Daerah Istimewa Khusus (DIK) yang dilegitimasi melalui ketetapan (TAP) MPR. Rancangan TAP-MPR tersebut, disusun bersama oleh semua elemen masyarakat Riau dan pemerintah pusat. Selanjutnya, diperjuangkan dan ditindaklanjuti secara teknis. Advokasi untuk ini akan lebih gampang, mengingat hasilnya akan dirasakan oleh semua komponen rakyat tanpa memandang latar belakang kesukumannya. ***



Untung Rugi Federalisme Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Gagasan untuk menjadikan Indonesia sebagai federal, kini menggelembung ke permukaan. Rapuhnya pemerintah pusat di Jakarta, telah menciptakan peluang pada daerah untuk menuntut haknya yang selama ini dikebiri. Wewenang daerah untuk hidup lebih otonom merupakan prasyarat utama berlanjutnya bangunan negara Indonesia yang utuh. Sebab selama ini, melalui penerapan sistem republik, kekuasaan menjadi terpusat bahkan cenderung berada pada satu orang. Pengalaman buruk itu, menjadi pelajaran berharga bagi daerah, sehingga siapapun yang menjadi presiden dan pemegang kekuasaan di tingkat pusat, tetap akan dicurigai melakukan praktek hegemoni kekuasaan.

Bagi provinsi Riau, opsi sistem ketatanegaraan Indonesia ke depan sangat penting dan strategis. Bila tidak ikut bermain dan mengantisipasinya secara dini, maka wilayah ini tetap menjadi bulan-bulanan pemerintah pusat.



Kemungkinan untuk merdeka seperti yang digagas Prof. dr. Tabrani Rab, mungkin dapat diterima, sepanjang itu bermuara kepada kesejahteraan rakyat. Namun yang perlu diingat, masyarakat Riau bukanlah kesatuan komunitas yang padu seperti halnya Timor Timur, Aceh dan Irian Barat. Memperjuangkan kemerdekaan secara militan, mungkin bukan karakter masyarakat Riau yang plural. Untuk memisahkan diri melalui perjuangan yang berdarah, sering tidak menarik dalam budaya masyarakat yang cenderung menghindari konflik. Militansi “amuk Melayu” mungkin baru muncul, bila tekanan memang sudah demikian berat, dan tidak ada opsi untuk menentukan pilihan.

Mencermati perkembangan situasi Indonesia terkini dan geliat masyarakat Riau menanggapi, pintu menuju “kemerdekaan” Riau sejati, menjadi sebuah negara yang berdaulat, terpisah dari NKRI, masih sulit terwujud. Tawaran untuk tetap sebagai bagian dari NKRI dengan sistem pemerintahan federal, cenderung dipilih sebagai upaya menegakkan kedaulatan rakyat Riau. Cara ini dianggap lebih menarik dan produktif untuk membangun kesejahteraan masyarakat, serta diharapkan mampu menghindari pertumpahan darah.

Masalah Federal

Istilah federal berasal dari kata Latin, yaitu *foedus* yang berarti kompak atau fakta. Makna khususnya di dunia modern menunjukkan suatu susunan di antara otonomi dua kelompok yang melakukan kontrak, yang membentuk entitas kelompok baru, meski masih tetap menyatakan kedaulatannya masing-masing. Inti federalisme menurut



Levingston (1956), tidak terletak dalam struktur institusional maupun konstitusional, tetapi terletak di dalam masyarakat itu sendiri. Pemerintah federal adalah suatu perencanaan, di mana kualitas federal dari masyarakat diartikulasikan dan dilindungi.

Federalisme memiliki karakteristik yang amat beragam, dan tidak banyak negara yang berhasil menjadikannya konstruktif bagi pembangunan masyarakat. Berdasarkan penelitian SR. David (1978), paling tidak terdapat 44 (empat puluh empat) bentuk federalisme di dunia modern sekarang ini. Keadaan ini, mengindikasikan bahwa federalisme secara khusus merupakan bentuk pemerintahan yang problematik, baik secara praktik maupun teoritis.

Menurut pandangan Morton Grodzin (1966), pemerintahan federal pusat dan daerah cenderung memperhatikan dirinya sendiri, lebih kurang sama dalam beberapa bidang aktivitas publik, sehingga menciptakan fungsi yang tumpang tindih dan membuat struktur menjadi amburadul. Bahkan P. Hollingworth (1979), mensinyalir bahwa struktur federalisme kooperatif tidak lebih dekat pada sifat yang kooperatif, sehingga menghalangi perluasan keadilan sosial di Australia. Berbagai masalah, seperti distribusi pendapatan, pemeliharaan pendapatan, tingkat ketenagakerjaan nasional, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebagai isu sentral sistem federal, justru tidak mampu dipecahkan oleh federalisme Australia.

Pandangan lebih skeptis dinyatakan EG. Whitlam dalam *"The Cost of Federalisme"*, yang menggambarkan ciri sistem federal adalah ketidak efisienan dan kekacauan akibat adanya rentetan biaya-biaya yang tidak terkoordinir. Usaha



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

mengatur sistem federal agar sampai pada kondisi yang menguntungkan, memerlukan biaya yang sangat besar. Persaingan politik antar negara bagian juga cenderung mendorong eksploitasi sumberdaya berlebihan dan pemberian subsidi yang kurang bermanfaat. Sistem federal cenderung melembagakan konflik dengan sifat kerja yang kontradiktif.

Visi Baik Federal

Federalisme, bagaimanapun juga tidak bisa diabaikan. Sebuah sistem federal, bagaimanapun bentuknya, lebih memungkinkan untuk mempertahankan pemerintahan yang demokratis. Ini berarti, sistem pemerintahan akan dioperasikan secara lebih dekat dengan rakyat, jika pemerintah negara bagian mampu mencermatinya. Sistem federal dianggap mampu meningkatkan pembangunan daerah melalui dana-dana publik yang dialihkan ke pemerintah negara bagian. Pembangunan akan semakin berisi sepanjang pemerintah negara bagian mampu memahami permasalahan masyarakat untuk dientaskan.

Lebih jauh, sistem federal menurut Holmes dan Shari-man mengenalkan dan menerima keanekaragaman masyarakat dan berusaha untuk memperbaiki kebencian yang muncul dari kepentingan setempat dengan cara mengizinkan dan mendorong berbagai jalan menuju kekuasaan. Kondisi ini akan melahirkan kompetisi dan membuat masyarakat berfikir dan berbuat untuk meningkatkan kualitas dirinya. Inovasi masyarakat dari bawah akan muncul sebagai representasi keinginannya untuk bertahan hidup.

Hipotesis yang dikemukakan Frederick (1958) meny-



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

takan bahwa sistem federal dapat melipatgandakan dan meningkatkan kesempatan untuk melawan kekuasaan yang terpusat. Federalisme menawarkan konsensus dalam penyelesaian masalah yang diusahakan untuk mereduksi ukuran kemarahan dan penindasan atas minoritas yang tertekan. Pada akhirnya konflik dapat dipecahkan secara damai dan menjadi benteng bagi menyebarnya kekuasaan yang otoriter. Melalui sistem federal, otonomi regional untuk menjamin pembangunan ekonomi daerah direkayasa secara konstitusional. Keberadaan pemerintah daerah diakui sebagai fasilitator terdekat dengan rakyat, yang memiliki tugas memajukan tegaknya keadilan di antara warga negara. Sumber-sumber di daerah dikelola secara regional. Dan upeti untuk pemerintah pusat hanya diberikan sesuai dengan konsensus yang telah disepakati bersama.

Riau ke Depan

Masyarakat Riau harus secara dini memainkan perannya dalam menentukan bentuk federalisme tersebut. Sebab jika tidak, Riau bisa terperangkap dengan petuah; *"keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya."* Rumitnya federalisme membutuhkan rancangan yang dibuat secara sungguh-sungguh. Masyarakat Riau harus melakukan "rembuk bersama" untuk membuat rancangan tersebut, mulai dari TAP MPR, Undang-undang, dan Peraturan Teknisnya. Jangan lagi terlena oleh *stream line* pemerintah pusat, sehingga yang lahir justru federalisme yang jauh dari aspirasi dan keinginan masyarakat Riau.

Beban pembangunan Riau ke depan sudah amat berat. Kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang selama ini senan-



tiasa dijadikan sebagai kendala, harus diubah cara pandangnya. Justru perbaikan SDM mesti dijadikan visi. Untuk itu, kewenangan mengelola sumberdaya alam menjadi modal dasar untuk mencapainya. Ini hanya mungkin diperoleh melalui bentuk federalisme yang sesuai dengan aspirasi masyarakat Riau. Sangat kecil kemungkinan NKRI akan memberikan kemerdekaan secara damai pada Riau, seperti Inggris memberikan kemerdekaan pada Malaysia dan Singapura. ***

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Kongres Rakyat atau Kongres “Risau”

Dinamika yang berkembang di Indonesia memiliki keragaman yang memang tidak gampang ditelaah. Banyak variabel yang selama pemerintahan rezim Orde Baru (Orba) dapat diabaikan, kini menjadi variabel bebas yang signifikan mempengaruhi. Khusus dalam bidang politik, masyarakat semakin mampu mengaktualisasikan persepsi mereka, meskipun kadang kala tidak didasarkan pada pemahaman yang mendalam terhadap konteks permasalahan yang dipersoalkan.

Rakyat semakin memiliki keberanian mengemukakan aspirasinya secara mandiri berdasarkan pengolahan terhadap apa yang dilihat, didengar dan dirasakannya. Melalui kemampuan berpikir yang dimilikinya, selanjutnya dipadu menjadi persepsi diri dan diaktualisasikan dalam bentuk pernyataan sikap, baik sebagai personifikasi perseorangan maupun secara berkelompok.

Dalam Kongres Rakyat Riau (KRR) II yang baru saja



usai, gejala tersebut terlihat amat dominan. Pribadi yang hadir memiliki eksistensi diri yang kuat, sehingga sulit untuk dipengaruhi, meskipun tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang realitas Riau secara strategis. Namun, mereka mampu menunjukkan bahwa lingkungan kehidupan mereka penuh dengan gejolak dan permasalahan.

Tuntutan-tuntutan yang akhirnya “bersemburan” dari dalam pikiran mereka itu, mengalir tanpa memperdulikan esensi kebersamaan. Yang pada akhirnya, melahirkan sesuatu yang amat mencengangkan, yang memerlukan perjuangan secara bersama dan utuh, yakni “Riau Merdeka”.

Risau

Aspek pertama yang dapat dicermati dari Kongres Rakyat Riau (KRR) II yang berasal dari kondisi masyarakat yang mengikutinya. Rakyat Riau, sejak bergulirnya reformasi, memang berada dalam keadaan risau. Mereka yang sudah sekian lama terkungkung oleh kekuasaan pemerintahan yang sentralistik, kini dihadapkan pada tantangan kesempatan otonomisasi. Hanya saja, kesempatan itu semakin kabur dalam kepercayaan mereka untuk direalisasikan, akibat dari tarik ulur yang dilakukan pemerintah pusat.

Kekayaan alam yang mereka miliki masih belum ada titik terang untuk dapat kembali mereka kuasai. Tanah ulayat, hasil tambang, hasil hutan, dan segala potensi alam yang selama ini “dijarah” pemerintah pusat. Sampai era pemerintahan sekarang, belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Janji manis yang pernah mereka dapatkan, tetapi kemudian pelecehan yang mereka tuai.

Ketika kesempatan untuk duduk bersama dalam sebuah



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

kongres ada, mereka seakan mendapatkan media untuk menyalurkan hati nuraninya, yang selama ini sudah sangat terluka. Keberadaan mereka yang sedang risau oleh segala problema kehidupan dan gantungan harapan, diangkut semuanya ke dalam media kongres. Maka, berkumpullah para rakyat untuk membulatkan visi, misi dan persepsi dengan latar belakang pribadi-pribadi yang risau.

Merisau

Pribadi-pribadi yang risau, yang kemudian menyatu dalam sebuah media kongres, tentunya bukan persoalan yang gampang untuk diorganisir. Profesionalisme panitia kongres sangatlah dituntut, agar mereka dapat diakomodir secara baik. Rakyat yang hadir dengan hati nurani yang menggelembung dan risau akan semua masalah lingkungan mereka yang *merisau*.

Apa yang terjadi pada Kongres Rakyat Riau (KRR) II kemarin, menunjukkan gejala betapa dinamisnya rakyat yang risau dan ingin memainkan peranannya masing-masing, tanpa memperhatikan lagi alur sidang yang akan dijalankan. Pengelola sidang (pimpinan sidang), menjadi kewalahan melihat begitu banyaknya peserta yang merisau. Peserta tanpa tunduk pada mekanisme sidang, berebutan untuk mengajukan pendapat.

Adakah itu pendapat yang benar sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai kongres, atau hanya sekedar luapan emosi mereka yang risau? Akibatnya, beberapa kali sidang terpaksa di -seor sementara waktu untuk memberikan kesempatan pada peserta mengelompok kembali pada utusannya masing-masing dan menunjuk salah seorang juru bicara.



Dari sini, terkesan pengelolaan kongres menjadi tidak profesional dan bahkan terkesan merisau. Untungnya, para peserta akhirnya mampu mengendalikan rasa risau mereka, sehingga sidang-sidang dapat dilanjutkan.

Merisaukan

Seperti sudah dapat dibayangkan sebelumnya, hasil yang akan diperoleh dari kongres tentunya akan merisaukan. Peserta yang risau, proses kongres yang agak merisau, banyaknya “tangan-tangan” yang bermain, menyebabkan keputusan yang dihasilkan kongres merisaukan berbagai pihak. Opsi merdeka yang menjadi pilihan terbanyak dalam kongres, tentunya sangat menggerahkan para birokrat Riau. Upaya mereka untuk memenangkan opsi otonomi, ternyata terganjal oleh keinginan rakyat melepaskan diri dari pemerintah NKRI yang sentralistik dan cenderung korup. Rakyat sepertinya tidak lagi memberikan legitimasi mereka pada pemimpinnya di Riau. Dalam khasanah ini, ada beberapa hal yang dapat dicermati.

Pertama, rakyat Riau memang sedang dihadapkan pada penderitaan dengan keberadaan mereka dalam lingkungan NKRI. Jalur konstitusi yang mereka tempuh selama ini, agar pemberdayaan mereka dapat dilakukan secara positif, hanya ditanggapi secara “plintat-plintut” oleh pemerintah pusat.

Harapan rakyat Riau yang selama ini terkenal lemah lembut, akhirnya memberontak bagaikan air bah dari sebuah bendungan yang jebol.

Kedua, para pemimpin daerah ternyata gagal membangun kepercayaan rakyat terhadap pimpinan formal mereka. Gubernur dan jajaran birokrasinya, tidak mampu melakukan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

konsolidasi masyarakat dalam memperjuangkan nasib rakyat yang secara elegan dan manis. Justru yang muncul kepermukaan adalah arogansi birokrasi yang makin melukai perasaan dan hati nurani masyarakat.

Berbagai persoalan yang muncul di Riau, sejak bergulirnya reformasi tidak mampu dikemas oleh pemerintah Riau dalam tataran solusi yang bersifat *win-win solution*.

Ketika proses pemekaran kabupaten akan dimulai, rakyat secara solid menyatukan diri untuk memperjuangkannya bersama-sama Pemda. Hanya saja, setelah perjuangan itu berhasil, arogansi birokrasi muncul kembali menginjak nilai kegotong-royongan masyarakat. Banyak masyarakat yang terperanjat akibat marwah mereka yang sebelumnya terakomodasi secara positif, kembali dikesampingkan secara tidak arif dan bijaksana.

Pada kondisi lain, berbagai persoalan masyarakat di Riau tidak sanggup diantisipasi dan diselesaikan secara baik. Munculnya peristiwa Tor Ganda dan Torus Ganda, kerusuhan di Lagoi, dan tekanan kehidupan ekonomi merupakan refleksi nyata, betapa rakyat belum juga dapat menggantungkan harapannya pada pemerintah yang ada sekarang. Krisis kepercayaan rakyat menunjukkan betapa urgennya penataan ulang terhadap birokrasi pemerintah Riau dan strategi pembangunan yang akan diterapkannya.

Ketiga, Gus Dur selaku presiden harus semakin arif dalam menyikapi masalah ini. Bantuan Rp. 500 juta yang diserahkan pada panitia kongres, merupakan persetujuan Gus Dur terhadap apapun yang akan dihasilkan kongres. Secara politik, Gus Dur sudah sangat memahami dan sadar terhadap tiga opsi yang ditawarkan dalam kongres. Hampir



sama dengan apa yang terjadi pada masa pemerintahan Habibie ketika membuka jajak pendapat di Timor Timur. Bercermin dari Timor Timur, khusus dalam masalah Riau, sepatutnya jugalah Gus Dur berjiwa besar untuk menerima hasil keputusan Kongres Rakyat Riau (KRR) II ini. Sebab bila tidak, kongres ini betul-betul hanya akan menjadi “kongres rakyat risau”, yang pada akhirnya akan bermuara pada keadaan yang amat merisaukan.***

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

“Saya Namakan, Kongres Rakyat Ri(s)au”

Kongres Rakyat Riau (KRR) II baru saja usai. Kongres yang diadakan selama tiga hari (29-31 Januari 2001) ini, menghasilkan opsi merdeka sebagai pilihan utama. Mengalahkan dua opsi lainnya, yaitu federal dan otonomi luas. Bagi masyarakat yang selama ini merasa “terjajah” oleh pusat, terpilihnya opsi merdeka tentu saja membawa angin segar. Namun, bagi para pemimpin yang duduk di kursi pemerintahan menganggap opsi merdeka hanya sebagai guyanan. Dan anehnya lagi, mereka pun mencari beribu alasan untuk mementahkan opsi merdeka ini.

“Walau apapun namanya kemerdekaan itu, tapi karena dibahas di komisi A, yang merupakan komisi politik, maka kemerdekaan itu, ya kemerdekaan politik,” ujar Edyanus Herman Halim menanggapi hasil kongres tertinggi masyarakat Riau tersebut. Untuk lebih lengkapnya mengenai seputar pelaksanaan KRR II dan apa yang harus dilakukan



setelah kongres tersebut, simak wawancara kru **Watan** dengan pengamat sosial ekonomi Riau ini.***

Bagaimana pendapat Anda terhadap hasil KRR II yang memilih merdeka dan implikasinya?

Hasil kongres ini merefleksikan beberapa hal. *Pertama*, kegagalan dari Saleh Djasit sebagai gubernur Riau. Kenapa sampai demikian? Menurut saya, berarti Saleh belum berhasil melakukan konsolidasi pada masyarakat yang selama ini sedang risau oleh krisis, yang disebut dengan krisis total itu. Kerisauan tersebut, mereka bawa ke dalam kongres. Nah, kemampuan pimpinan daerah untuk melakukan konsolidasi ke bawah, di tengah masyarakat, kunci penting bagi kebulatan pendapat masyarakat di provinsi Riau.

Sampai saat ini, ada beberapa masalah masyarakat yang tidak bisa dipecahkan atau dikeluarkan solusinya secara baik, baik itu kasus Tor Ganda dan Torus Ganda maupun masalah Lagoi. Kemudian program pemberdayaan ekonomi rakyat belumlah nampak. Sehingga persepsi dan pendapat tokoh lain lebih mengena. Pemberdayaan rakyat itu lebih dihargai. Oleh sebab itu, rakyat lebih cenderung memilih merdeka dari pada opsi otonomi luas atau federal.

Kedua, faktor Gus Dur. Gus Dur sudah saatnya menyadari bahwa masyarakat Riau bukanlah masyarakat *memble*. Dengan adanya pernyataan “plin-plan” Gus Dur itu, hati nurani masyarakat Riau menjadi terusik, lalu timbullah perlawanan dalam hati nurani mereka; “*lebih baik mereka merdeka dari pada bergabung dengan NKRI*”. Apalagi, Gus Dur membantu kongres ini sebesar Rp. 500 juta tanpa



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

ada penjelasan rinci. Masyarakat memahaminya sebagai upaya Gus Dur mengintervensi kongres, agar menghasilkan otonomi luas. Padahal hati nurani rakyat Riau sudah terluka oleh berbagai *statement* Gus Dur, baik masalah 75 persen bagi hasil minyak yang tidak terealisasi maupun perkataan “Riau tidak ada apa-apanya.”

Ini tentu saja merefleksikan bahwa pemerintah pusat tidak mampu memberikan sebuah harapan pada rakyat Riau. Oleh sebab itu, harapan yang dicetuskan oleh masyarakat Riau, lari kepada keinginan untuk merdeka. Walau apapun namanya kemerdekaan itu. Tapi, karena komisi A merupakan komisi politik, tentu kemerdekaan ini adalah opsi kemerdekaan politik.

Ketiga, ada aspek mendasar dari keinginan masyarakat Kepulauan Riau (Kepri) yang dikesampingkan oleh kongres. Saya yakin, peserta kongres banyak yang simpati dan setuju. Tidak terakomodirnya harapan masyarakat Kepri itu, menyebabkan beberapa peserta yang peduli dan simpatik, lebih cenderung memilih merdeka dari pada yang lain. Sesungguhnya sangat kurang pada tempatnya juga, kalau keinginan masyarakat Kepri itu langsung saja di *-drop* begitu saja. Seharusnya dibawa dalam suatu rekomendasi kongres.

Kemudian kita juga melihat, rekomendasi yang dihasilkan oleh kongres banyak bersifat praktis, tidak mempersoalkan strategis. Nah, komisi politik itu kan belakangan dibahas, setelah sosial ekonomi dan sosial budaya. Pada saat membahas sosial ekonomi dan sosial budaya itu, banyak pendapat peserta tidak terakomodir.

Jadi, dengan sendirinya mereka yang berpikir strategis



tentu akan melihat persoalan ini lebih ke depan lagi. Nah, ketika komisi politik membicarakan opsi, solusi yang paling mungkin dan paling strategis untuk menindaklanjuti rekomendasi komisi sosial ekonomi dan sosial budaya adalah opsi merdeka. Akibatnya, pilihan merdeka lebih menggembung dari pada pilihan terhadap opsi-opsi yang lain.

Dengan terpilihnya opsi merdeka, kira-kira apa langkah strategis mendesak yang perlu segera dilakukan?

Ada beberapa langkah strategis yang menurut saya perlu diambil sekarang adalah di antaranya; *pertama*, menerima secara lapang dada bahwa kita memilih merdeka. *Kedua*, sosialisasikan pada seluruh lapisan masyarakat, bahwa merdeka adalah pilihan. Agar mereka siap menghadapi setiap kemungkinan atau konsekuensi pilihan ini. Selanjutnya, kita perlu merancang betul strategi untuk mengimplementasikan hasil kongres. Rancangan ini, harusnya disusun secara bertahap. Terserah apa maunya kemerdekaan itu, karena ini merupakan keputusan tertinggi rakyat Riau. Itu harus dihormati.

Apakah perlu dengan membentuk komite atau dewan persiapan kemerdekaan Riau atau perangkat sejenis lain?

Ya, harus itu. Bukan dalam bentuk komite seperti itu. Kita harus seperti Indonesia waktu dulu, yaitu dengan mempersiapkan panitia persiapan kemerdekaan Riau. Itu yang harus dibuat sekarang.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Banyak yang berpendapat kemerdekaan yang dipilih dalam kongres itu belum jelas bentuknya. Bagaimana menurut Anda?

Ini hanya kelihaihan beberapa oknum saja. Mereka melakukan rekayasa-rekayasa, begitu. Kita tahu, komisi A itu komisi politik. Jadi, opsi-opsi itu, baik opsi merdeka, federal maupun otonomi luas, itu *kan* bentuk dari pada sistem pemerintahan. Tidak ada kemerdekaan yang lain-lain. Otonomi menyangkut masalah pemerintahan, federal menyangkut masalah pemerintahan, tapi kenapa merdeka tidak menyangkut masalah pemerintahan? *Kan* aneh itu.

Lagi pula, merdeka di situ *kan* sudah jelas. Ia berada dalam komisi politik dan di tengah opsi menyangkut sistem pemerintahan. Kalau demikian, merdeka secara politik, *dong!* Kita harus terima konsekuensi ini. Kalau rakyat sudah berani memilih merdeka, rakyat Riau harus konsekuen untuk mengimplementasikan hasil kongres itu. Nanti, apakah itu akan menjadi *bargaining*, terserah nanti. Oleh karena itu, panitia persiapan yang harus merancang strategi, kemudian mengimplementasikannya.

Tanggapan Anda tentang proses yang terjadi dalam kongres?

Saya ingin menyatakan kepada wartawan, saya menamakan kongres ini "Kongres Rakyat Ri(s)au". Kenapa demikian? *Pertama*, persertanya rakyat. Rakyat yang sedang risau oleh berbagai permasalahan yang ada di provinsi ini. Lalu, mereka ke sini dengan perasaan risau tadi. Pelaksanaan kongres inipun "merisau". Kenapa? Tidak ada pengaturan yang tersusun baik, sehingga berkali-kali *defending* dan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

berkali-kali harus *diskor* sidang. Akhirnya, mekanisme yang terjadi di kongres kurang efektif.

Kemudian, hal yang perlu dicatat lainnya adalah bahwa peserta kongres dari berbagai wilayah tidak datang dengan suara yang bulat. Mereka tidak punya juru bicara. Tidak punya konsep, apa yang akan dibicarakan. Makanya, tidaklah mengherankan jika panitia dan pimpinan sidang meng-*skor* sidang supaya mereka kembali ke kelompok wilayah masing-masing, menunjukkan juru bicara, lalu menentukan apa yang harus dibicarakan. Nah, inilah kelemahan sosialisasi.

Akhirnya, hasil kongres ini “merisaukan”. Kenapa merisaukan? Opsi merdeka harus diterima dengan berbagai konsekuensi. Apakah Riau sudah siap dengan berbagai konsekuensi ini? Tentu ini merisaukan. Apakah nanti sosialisasi hasil kongres dapat pula berjalan baik? Apakah memang seluruh komponen nanti bisa menerima? Apa yang terjadi dari solusi ini?

Untuk itu, kita sangat mengharapkan agar semua pihak bisa *berkepala dingin*, sehingga apa yang merisaukan ini tidak menjadi hal-hal yang dekonstruktif bagi pembangunan masyarakat Riau.

Menurut Anda sudah representatifkah kongres yang dikatakan mewakili rakyat Riau ini?

Kalau representatif atau tidaknya, menurut saya harus melalui referendum. Tapi, inikan cerminan berbagai pemikiran rakyat Riau. Seperti yang saya katakan tadi, kenapa ini terjadi? Ya, jelas karena kelemahan pemerintah daerah.

Dalam hal ini, gubernur melakukan konsolidasi kepada



masyarakat, harusnya *kan* begitu. Dia (gubernur, *red*) tidak mampu mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah yang ada. Sebab, jika tidak, maka tidak akan terjadi seperti ini. Saya kira ini merupakan luapan yang berkecamuk di dalam hati nurani masyarakat Riau yang hadir di kongres ini. Masyarakat Riau yang sedang risau.***

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.